

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa dalam kaitannya dengan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas, tingkat ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dari persentase hubungan yang sangat rendah yakni 1,7% dan tentunya hal ini membuktikan bahwa aspek fasilitas umum ramah disabilitas bukanlah faktor utama dari keterlibatan penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam upaya partisipasi politik. Kendati demikian, fasilitas umum ramah disabilitas yang mendukung partisipasi politik konvensional mereka harus tetap diperhatikan mengingat aksesibilitas khusus yang dibutuhkan mereka. Sehingga hal ini nantinya dapat menunjang partisipasi politik konvensional mereka kaitannya dengan demokratisasi di ranah lokal.

Implikasi dari hasil 1,7% ini menunjukkan bahwa wacana-wacana tentang disabilitas kaitannya dengan fasilitas yang ramah bagi mereka tetap menjadi hak yang harus dipenuhi dan tidak terpisahkan dari mereka. Selain itu, meskipun tidak signifikan, keberadaan fasilitas umum ramah disabilitas ini masih mempengaruhi upaya partisipasi politik mereka di Kabupaten Banyumas. Temuan di lapangan juga mengindikasikan bahwa masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas yang kurang mengetahui keberadaan fasilitas umum ini.

Kurangnya pengetahuan mereka terhadap fasilitas umum ramah disabilitas ini diakibatkan oleh kurangnya informasi dan aksesibilitas ke fasilitas umum

tersebut yang turut didukung oleh persebaran fasilitas umum ramah disabilitas yang tidak merata. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas tidak hanya didasari atas keberadaan atau ketersediaan fasilitas umum saja, namun faktor-faktor lain juga turut andil dan lebih berpengaruh dalam hal ini. Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan yang dikeluarkan mengenai penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak ini.

Fasilitas umum ramah disabilitas memang penting mengingat hal ini adalah isu global yang harus diturunkan pada tingkat lokal. Namun, dalam aspek pemenuhan partisipasi politik, ketersediaannya perlu di pertimbangkan kembali. Sehingga anggaran atau modal pemerintah lebih terspesifikasikan pada aspek-aspek atau perihal lain yang lebih penting seperti jenis sosialisasi atau edukasi bagi penyandang disabilitas yang lebih memperhatikan kebutuhan mereka atau bahkan membuat suatu *platform* politik yang lebih mudah dan menyeluruh untuk dijangkau seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas yang semata-mata untuk memenuhi kewajiban partisipasi politik mereka.

Secara garis besar, terbuktinya keterkaitan yang tidak signifikan antara ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas dengan partisipasi politik di Kabupaten Banyumas menjadi kelebihan penelitian ini. Namun, terfokusnya penelitian seputar partisipasi politik disabilitas ini pada Kabupaten Banyumas juga menjadi kekurangan dari penelitian ini. Dimana hal tersebut menjadikan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan di seluruh daerah Indonesia. Oleh karena itu, peneliti

menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji topik yang sama dengan substansi dan lokus yang berbeda.

